

Judul : Catatan akhir tahun komisi VI, koperasi desa bisa jadi soko guru ekonomi rakyat
Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Catatan Akhir Tahun Komisi VI

Koperasi Desa Bisa Jadi Soko Guru Ekonomi Rakyat

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan catatan akhir tahun terhadap kinerja Kementerian Koperasi, khususnya dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

IA mengingatkan, koperasi desa memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi rakyat, makanya harus dikelola dengan baik.

"Secara konseptual, koperasi adalah institusi ekonomi milik anggota. Ia tidak boleh diperlakukan seperti proyek pemerintah yang hanya mengejar target administratif," ujar Darmadi dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Menurut Darmadi, pendekatan koperasi tak boleh *top-down* yang terlalu domina

"Ketika koperasi dibentuk karena dorongan program, bukan kesadaran anggota, partisipasi yang muncul menjadi formal. Rapat anggota hanya prosedur, bukan forum pengambilan keputusan ekonomi," tegasnya.

Ia menekankan, koperasi seharusnya dibangun sebagai institusi ekonomi yang hidup dari partisipasi anggota, bukan sebagai unit

administratif pelaksana program.

"Jika koperasi diperlakukan seperti proyek, maka yang lahir bukan kemandirian ekonomi, melainkan ketergantungan baru," kata Darmadi.

Darmadi mengingatkan pandangan tersebut sejalan dengan pandangan Bung Karno yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, bukan sebagai instrumen birokrasi.

"Bung Karno menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan perpanjangan tangan administrasi negara. Jika koperasi kehilangan ruh itu, maka ia hanya akan menjadi organisasi formal tanpa daya hidup," ujarnya.

Darmadi juga menyoroti persoalan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia pengurus KDMP. Menurutnya, dukung-



Darmadi Durianto

an pembiayaan negara belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan manajemen dan kompetensi pengelola koperasi di desa. "Fakta di lapangan menunjukkan kualitas SDM masih menjadi persoalan serius. Dari evaluasi awal, hanya sekitar 3 persen pengurus KDMP yang berpendidikan S1, sementara sekitar 97 persen lainnya berpendidikan di bawah S1," ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Darmadi, memperlebar governance gap antara besarnya dana yang

dikelola dengan kemampuan pengelolaan usaha koperasi.

Ia mengingatkan, pengalaman berbagai program serupa menunjukkan koperasi yang dibangun tanpa fondasi kelembagaan dan SDM yang kuat umumnya hanya bertahan dua hingga tiga tahun, lalu stagnan setelah dukungan pemerintah berkurang.

"Jika tidak dikoreksi, KDMP berpotensi menjadi beban fiskal jangka menengah, bukan penggerak ekonomi desa," tambahnya.

Selain tata kelola, Darmadi bicara model bisnis KDMP yang cenderung diseragamkan tanpa mempertimbangkan karakter ekonomi desa.

"Tidak semua desa cocok dengan koperasi ritel atau distribusi. Ada desa pertanian, perikanan, jasa, hingga wisata. Koperasi harus tumbuh dari kebutuhan dan keunggulan lokal," jelasnya.

Menurutnya, penyeragaman justru menyulitkan koperasi mencapai skala ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Darmadi juga mengingatkan potensi distorsi pasar lokal apa-

bila KDMP dipersepsikan sebagai pelaku usaha yang mendapat keistimewaan negara.

"Jika koperasi hadir sebagai 'pemain negara', bukan sebagai wadah kolektif warga, yang muncul justru resistensi sosial dan konflik dengan pelaku usaha lokal," katanya.

Ia menilai keberhasilan KDMP selama ini masih terlalu banyak diukur secara administratif, seperti jumlah koperasi terbentuk atau serapan anggaran.

"Keberhasilan koperasi seharusnya diukur dari peningkatan pendapatan anggota, kesehatan usaha, dan kemampuan bertahan tanpa subsidi. Bukan sekadar angka di laporan," ujarnya.

Menutup pernyataannya, Darmadi berharap kebijakan koperasi benar-benar berdampak dan selaras dengan cita-cita ekonomi kerakyatan.

"Jika dibenahi secara serius, koperasi desa bisa kembali menjadi sokoguru ekonomi rakyat yang berdaulat dan berkeadilan, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa," pungkasnya. ■ FAQ